

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aspinall, Edward dan Sukmajati, Mada. 2016. *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. Singapore: NUS Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Butt, Simon dan Lindsey, Tim. 2018. *Indonesian Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2021. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Fahmi, Khairul. 2017. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Goodwin-Gill, Guy S. *Free and Fair Elections*. 2006. Geneva: Inter-Parliamentary Union.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). 2010. *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA.
- Junaidi, Veri. 2013. *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator*. Jakarta: Themis Books.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 2005. *Metodologi Penelitian*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Nugroho, S. S.; Haryani, A. T.; Farkhani. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka, Jakarta.
- Perdana, Aditya; et al. 2017. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Disunting oleh Pramono U. Tanthowi, Aditya Perdana, dan Mada Sukmajati. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Prayudi; Budiman, Ahmad; Ardipandanto, Aryojati. 2017. *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Malang.
- Riwanto, Agus; et al. 2023. *Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT RajaGrafindo Persada.
- Santoso, T. dan Buadiarti, I. 2018. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan*

dan Pengawasan. Sinar Grafika, Jakarta.

Sopacua, M. G. et al. 2023. *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*. Widina Media Utama, Bandung.

Sugiyono, 2006, *Metode peneliatan kuatitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta/atau Walikota dan Wakil Walikota.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 tentang Pelanggaran Administratif Pemilihan Walikota Bandar Lampung.

D. Jurnal

Ahmad Jukari. "Pelanggaran Administrasi yang Terstruktur Masif dan Sistematis dalam Pemilihan Kepala Daerah: Bagaimana Prosedur Penanganan dan Konstruksi Hukumnya?" *Jurnal Al-Burhan*, (2022), 12:1.

Alam, Ruben Nicholas, David Lestarius Immanuel Baeha, Kezia Estevania Christabel Eliezer, and Rasji Rasji. "Penyalahgunaan Kekuasaan Eksekutif Dalam Sistem Ketatanegaran." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 5 (2025): 3509–17.

Ali, M. Mahrus, Rachman, Irfan Nur, Wijayanti, Winda, Putranto, Rio Tri Juli, Anindyajati, Titis, & Asih, Putria Gusti. 2012. "Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 1.

Amanda Fitriani Eka Putri, Rasji, dan Salsabillah Ayu Puspita. "Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, (2024), 10:24.

Aminuddin Kasim, Supriyadi, & Andi Intan Purnamasari. 2021. "Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pilkada." *Mimbar Hukum*, Vol. 33, No. 2.

Aprilian Sumodiningrat. "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Paradigma Hakim dalam Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024." *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, (2024), 2:5.

Bungasan Hutapea. "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, (2015). 4:1.

Claudio C. Warouw, M. Hero Soepeno, dan Revy S.M. Korah. "Tinjauan Yuridis Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah." (2023), 11:1.

Farah Syah Reza dan Andi Tenri Sapda. "Implications of Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 for the Dispute Resolution of Regional

- Head Election Results." *SIGn Jurnal Hukum*, (2024), 6:2.
- Huda, M. (2024). Pola pelanggaran pemilukada dan perluasan keadilan substantif. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 1–22.
- Hicken, Allen. "Clientelism." *Annual Review of Political Science* 14, no. 1 (2011): 289–310.
- Inosentius Samsul. "Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK: Kewenangan Siapa?" *Info Singkat Hukum*, (2014), 6:10.
- Iza Rumesten RS. "Dilema Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada." *Jurnal Konstitusi*, (2016), 11:4.
- Mahyudin, Haryanto, E., & Marsinah, R. (2025). Impact of structured, systematic, and massive violations in elections. *Law and Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 45–60.
- M. Mahrus Ali, Irfan Nur Rachman, Winda Wijayanti Putranto, Rio Tri Juli, Titis Anindyajati, dan Putria Gusti Asih. "Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif." *Jurnal Konstitusi*, (2012), 9:1.
- Mustika, Yandi Asda, Rasyidin Rasyidin, dan Suadi Suadi. "Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bener Meriah." *Jurnal Transparansi Publik (JTP)* 1, no. 1 (2021): 31–48.
- Parbuntian Sinaga. "Pemilihan Kepala Daerah dalam Konstruksi UUD NRI 1945." *Binamulia Hukum*, (2018), 7:10.
- Rika Yanita Susanti dan Khairul Fahmi. "Relasi Birokrat dan Politisi dalam Pilkada Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020." *Indonesian Journal of Religion and Society*, (2022), 4:1.
- Salsabillah, Nurfaizah, Rahmawati, Putri, Saputra, M. Rizky Indrawan, & Mazura, Desi. "Tinjauan Yuridis Pelanggaran TSM oleh Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Umum 2024." *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, (2024), 8:6.
- Santoso, A. N., & Arsil, F. (2025). Administrative violations and process disputes in regional head elections. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 6(1), 101–115.
- Soenmandjaja, T. B., dan Tri Susilowati. "Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Kebijakan Publik Dan Pemilihan Umum." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 683–698.
- Veri Junaidi. "Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif: Suatu Sebab

Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010." *Jurnal Konstitusi*, (2016), 7:5.

Yusuf, Azry, Respaty Namruddin, Mirfan Mirfan, Mila Jumarlis, dan Muh. Fachrur Razy Mahka. "Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan." *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, no. 1 (2024): 104–108.

E. Majalah

Akbar, Nawir Arsyad. *Majalah Konstitusi* No. 216: Keterlibatan Mendes untuk Sang Istri Pengaruhi Hasil Pilbup Serang. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2025.

F. Laporan Penelitian

Amsari, Feri, dkk. *Laporan Penelitian: Malpraktik Penyelenggaraan Pilkada 2024 dan Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Themis Indonesia, 2025.

G. Kamus

Sugono, Dendy, dkk. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

H. Artikel Internet

Administrator. 2023. *Tiga Lembaga Negara Ini Berwenang Adili Sengketa Pemilu*. SIP Law Firm, 17 Agustus 2023. Diakses pada 1 April 2025, dari <https://siplawfirm.id/tiga-lembaga-negara-ini-berwenang-adili-sengketa-pemilu/>

Administrator. 2025. *4 Daerah Ini Terpaksa PSU akibat Pelanggaran TSM*. Metro TV News. Diakses pada 10 Maret 2025, dari <https://www.metrotvnews.com/read/kWDCn7L7-4-daerah-ini-terpaksa-psu-akibat-pelanggaran-tsm>.

Administrator. 2025. *Menyoal Keterlibatan Mendes dalam Pilbup Serang*. Mahkamah Konstitusi RI. Diakses pada 10 Maret 2025, dari <https://www.mkri.id/index.php?id=22092&page=web.Berita>.

Al Ayyubi, Sholahuddin. 2025. *Mendes PDT Yandri Susanto Disebut Janjikan*

Umrah untuk Kades Jika Istrinya Menang Pilkada. Kabar24, 7 Februari 2025. Diakses pada 1 April 2025, dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20250207/15/1837719/mendes-pdt-yandri-susanto-disebut-janjikan-umrah-untuk-kades-jika-istrinya-menang-pilkada>

Argawati, Utami. "Kewenangan MK Menyelesaikan Sengketa Pilkada Bersifat Permanen," dikunjungi pada tanggal 13 Mei 2025, <https://www.mkri.id/index.php?id=18566&menu=2&page=web.Berita>.

Fath Putra Mulya. 2025. *MK Perintahkan PSU Pilkada Serang Sebab Ketidaknetralan Kades Terbukti.* Diakses pada 28 Juli 2025, dari <https://www.antaraneews.com/berita/4670137/mk-perintahkan-psu-pilkada-serang-sebab-ketidaknetralan-kades-terbukti>

Muhammad Iqbal. 2019. *Link Berita Online Dijadikan Bukti, Bawaslu Tolak Laporan BPN.* Diakses pada 28 Juli 2025, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190520122749-4-73544/link-berita-online-dijadikan-bukti-bawaslu-tolak-laporan-bpn>

Purba, David Oliver. "Mendes Yandri Terbukti Cawe-cawe Pencalonan Istrinya, Pilkada Serang Diulang," dikunjungi pada tanggal 13 Mei 2025, <https://regional.kompas.com/read/2025/02/24/205615078/mendes-yandri-terbukti-cawe-cawe-pencalonan-istrinya-pilkada-serang-diulang>.

Purnamasari, D. D. 2024. "Putusan MK Terkait Pilkada Diapresiasi, Pemerintah-DPR Diminta Tidak Bermanuver." Dikunjungi 25 April 2025, dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/08/21/putusan-mk-terkait-pilkada-diapresiasi-pemerintah-dpr-diminta-tidak-bermanuver>.

Rachmwati. 2025. *MK Batalkan Pilkada Serang 2024, Menteri Yandri Disebut Ikut Campur Kemenangan Istri.* Kompas, 25 Februari 2025. Diakses pada 1 April 2025, dari <https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2025/02/25/065000688/mk-batalkan-pilkada-serang-2024-menteri-yandri-disebut-ikut-campur>

Renie Aryandani. 2024. *Perbedaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Pidana Pemilu, dan Sengketa Pemilu.* Diakses pada 28 Juli 2025, dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pelanggaran-administratif-pemilu-pidana-pemilu-dan-sengketa-pemilu-lt65b248d363d2e/>

Rusdianto Sudirman. 2025. *Diskualifikasi Semua Paslon, MK Bukan Lagi Mahkamah Kalkulator*. Diakses pada 28 Juli 2025, dari <https://www.iainpare.ac.id/blog/opini-5/diskualifikasi-semua-paslon-mk-bukan-lagi-mahkamah-kalkulator-4552>

Seira Tamara. 2025. *Cawe-cawe dalam Pilkada Kabupaten Serang: Mendes Yandri Harus Mundur!*. Diakses pada 28 Juli 2025, dari <https://antikorupsi.org/id/cawe-cawe-dalam-pilkada-kabupaten-serang-mendes-yandri-harus-mundur>

Yuniarto, Topan. 2020. "Pilkada Langsung Serentak: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia." Dikunjungi 25 April 2025, dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-langsung-serentak-sejarah-dan-perkembangannya-di-indonesia>.

